

BAB IV

NURCHOLISH TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA

A. DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA

Belakangan ini terdengar nyaring suara-suara sekitar demokarsi, demokratisasi, dan keterbukaan. Suara-suara Kecenderungan di Asia Timur, bahkan boleh dikata di seluruh dunia, terjadi di bidang politik, yaitu peralihan kearah demokrasi dalam banyak negara. Ini terjadi karena dorongan faktor-faktor tertentu, seperti kemakmuran ekonomi, kegagalan rezim totaliter, meningkatnya komunikasi, interaksi antar berbagai sektor masyarakat yang ikut menyebarkan ide-ide tentang demokrasi dan konsep tentang keabsahan politik. Ditambah lagi dorongan dan pengaruh negeri-negeri demokratis besar di dunia. Maka, banyak negara mengalami proses demokratisasi, atau memasuki ambang pelaksanaan demokrasi yang lebih maju dan kompleks. Dan seperti dikatakan Samuel P. huntington, "demokratisasi adalah suatu proses terus menerus, yang kini semakin tidak bisa dibalikkan lagi.¹ Kondisi serupa itu juga dialami oleh negeri kita memnyusul berbagai kemajuan hampir di segala bidang sebagai hasil dari pembangunan selama orde baru ini. Timbulnya dorongan kearah demokrasi yang lebih maju oleh perkembangan ekonomi ini disebabkan adanya kaitan yang jelas antara demokrasi dan tingkat kemakmuran rakyat. Ini juga disebabkan semakin banyaknya jumlah kelas menengah yang memainkan peranan penting di bidang

¹ . Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, 1995, hal. 30

ekonomi, ilmu pengetahuan, profesi, dan lain-lain. Meskipun tidak sepesat perkembangan yang ada di negara-negara industri baru, gejala kemajuan itu juga jelas menjadi ciri utama negara kita.

Persis seperti yang pernah dikatakan oleh salah seorang pemimpin kita bahwa keterbukaan adalah suatu "cara", bukan "tujuan", demokrasi pun harus kita pandang sebagai "cara" mencapai tujuan, dan bukan tujuan itu sendiri. Maka logikanya ialah bahwa suatu bentuk demokrasi tidak dapat diterapkan begitu saja secara kaku dan dogmatis, jika diperkirakan justru merusak atau mengganggu hasil-hasil positif perkembangan negara yang telah dicapai. Adalah *absurd* untuk melakukan hal demikian. Karena yang esensial adalah proses, maka beberapa ahli, seperti Willy Eicher, berpendapat bahwa demokrasi bukanlah suatu nilai statis yang terletak di suatu tempat di depan kita, lalu kita bergerak kesana untuk mencapainya. Bagi Eicher demokrasi adalah suatu nilai dinamis, karena nilai esensialnya adalah proses ke arah yang lebih maju dan lebih baik dibanding dengan yang sedang dialami oleh suatu masyarakat atau negara. Jadi Eicher melihat bahwa demokrasi adalah identik dengan demokratisasi. Yang penting adalah bahwa suatu masyarakat atau negara terdapat proses terus menerus, secara dinamis, dalam bergerak perkembangan dan pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Cukuplah suatu masyarakat disebut demokratis selama ia bergerak tanpa berhenti menuju kepada yang lebih baik.

Maka dari sisi penglihatan Eicher negeri kita harus dipandang sebagai sebuah negara yang mempunyai potensi untuk demokratis, karena tetap dan terus bergerak menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Sebaliknya, negeri seperti

Republik Afrika Selatan, sekalipun memiliki sistem politik parlementer yang liberal namun karena dalam nilai yang jauh lebih fundamental, yaitu pengakuan terhadap persamaan hakiki umat manusia, negara itu tidak pernah bergerak satu inci pun dari ideologi rasialisme dan apartheidnya yang telah dianut berabad-abad, maka ia sama sekali bukanlah negara yang mencerminkan demokratis. Bahkan banyak alasan untuk menyebutnya sebagai negara tanpa perikemanusiaan menurut ukuran nilai-nilai Pancasila kita dan menurut nilai kemanusiaan yang universal tentunya.

Karena pengertian demokrasi sebagai cara dan proses itu, maka tidaklah mengherankan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi sangat beragam dari satu negara ke negara lainnya. Misalnya, jika kita melihat negara-negara dengan sistem demokrasinya yang paling mantap dan mapan pada saat sekarang ini, maka berbeda dengan kesan sepintas kebanyakan orang kita dapati kebanyakan justru berbentuk kerajaan yaitu Inggris, Belanda, Belgia ditambah dengan Kanada, Australia yang mengakui mahkota Inggris Raya sebagai kepala negara masing-masing. Tetapi republik-republik demokratis lainnya mengalami kegoncangan dalam tingkat tertentu, seperti Perancis, Jerman Barat, dan Italia. Jepang dan India adalah negeri-negeri demokratis yang mapan setelah PD II.² Jepang mempunyai segi keunikan karena sejauh ini merupakan satu-satunya negeri bukan Barat yang demokratis dan sekaligus maju industrinya. India pun unik karena, tidak saja merupakan sebuah negeri demokratis yang bukan Barat, biarpun

² Nurcholish Madjid, *Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia*, dalam Elza Peldi Taher, (ed.), 1994, hal. 204

tidak saja merupakan sebuah negeri demokratis yang bukan Barat, biarpun demokratis namun dari segi perkembangan ekonominya tergolong yang paling miskin di dunia.

Berdasarkan kenyataan itu, maka sangat dibenarkan jika bangsa Indonesia mempunyai sistem demokrasi yang lebih sesuai dengan keadaan Indonesia.

A.1. PRINSIP PERSAMAAN, PERBEDAAN DAN KOMPONENNYA

Jika kita dengan tegas menilai Republik Afrika Selatan, sebagaimana disinggung diatas, sebagai negara yang sama sekali tidak disebut sebagai negara yang demokratis, maka salah satu dasarnya adalah kesadaran kita yang mendalam akan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab dalam pandangan Demokrasi Pancasila, suatu sistem politik demokratis dengan sendirinya harus secara tulus mencakup nilai hidup kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kemanusiaan dalam Pancasila bukanlah sekedar kemanusiaan, melainkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin mirip, namun belum tentu identik, dengan apa yang dinamakan Eric Fromm, *socialst humanism*. Dan kemanusiaan Pancasila itu, telah disinggung berporos pada prinsip persamaan umat manusia. Bentuk nyata dan terpenting dari egalitarianisme itu adalah prinsip *equality membership*, keanggotaan yang sama, tanpa diskriminasi, dalam masyarakat. Namun sebagai kelanjutan dari kemanusiaan sejagad, maka dalam prinsip tertentu tentang egalitarianisme itu kita tidaklah berbeda dengan yang ada sebagai kebenaran di seluruh dunia. Dalam hal ini, T. H. Marshall menjelaskan bahwa prinsip persamaan ini memiliki tiga komponen primer, yaitu, komponen

Perancis hanya mencakup dua komponen yaitu, komponen sipil dan politik. Sedangkan komponen ketiga menjadi penting hanya setelah pertengahan abad ke-19. Komponen primer pertama meliputi jaminan tentang apa yang disebut "hak-hak alam", yang oleh Jhon Lock dirumuskan sebagai "kehidupan, kebebasan, dan pemilikan" (*life, liberty, and property*). Itu semua kemudian dikembangkan dan dirinci dalam Deklarasi Perancis tentang hak-hak manusia dan dalam Undang-undang Amerika tentang Hak-hak asasi.³

Karena komponen priemer civil itu, maka demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa ditegakkannya hak-hak asasi manusia. Demokrasi juga meuntut adanya persamaan warga di depan hukum, serta ditegakkannya hukum itu sendiri.

A.2. MASALAH PEMILIHAN UMUM

Komponen primer kedua, yaitu "politik" warga negara, yang terfokus pada pelaksanaan pemilihan demokratis. Mula-mula prinsip persamaan warga negara diperkenalkan oleh sistem politik Yunani Kuna hanya dalam lingkup negara kota. kemudian Revolusi Perancis yang menerapkan prinsip itu untuk pemerintahan masyarakat dalam skala besar, yaitu negara nasional, dan untuk semua orang, tanpa diskriminasi.⁴ sementara itu, tetaplah mustahil bagi suatu pemerintah, termasuk yang modern, untuk memberi hak yang benar-benar sama dalam partisipasi nyata secara langsung kepada setiap pribadi warga negara. Maka,

³. Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1988, hal. 67

⁴. Samuel P. Huntington, *Op cit*, hal. 54

perkembangan konsep itu lebih lanjut menuju ke arah penciptaan lembaga-lembaga perwakilan seperti tercantum dalam sila keempat Pancasila. Di situ persamaan politik politik dipusatkan pada seleksi pimpinan pemerintah paling atas umumnya lewat partisipasi dalam suatu sistem pemilihan umum.

Dalam pemilihan umum atas dasar *egalitarianism*, tidak dianut pandangan dan praktek bahwa nilai suara seseorang atau sekelompok pemilih tertentu lebih penting daripada nilai suara seseorang yang lain. Tanpa memperdulikan suatu kedudukan seseorang dalam masyarakat, nilai suara orang itu adalah mutlak sama dengan nilai suara orang lain mana pun juga. Semua itu berkembang menuju pada prinsip satu orang satu suara (*one man, one vote*), baik berkenaan dengan akses ke pemilihan maupun dalam timbangan nilai masing-masing suara untuk menentukan hasil pemilihan. Prinsip ini juga menolak praktek penunjukan seseorang secara *arbitrer* untuk mewakili rakyat.

Tidak kurang pentingnya adalah prinsip yang menyangkut sistem prosedural pemilihan formal, yang mencakup aturan-aturan tentang hak untuk memilih dan aturan tentang bagaimana suara itu dihitung. Tujuannya adalah agar dalam prinsip ini tidak ada seseorang pun dari warga negara yang teringkari hak pilihnya dan tidak satu suara pun yang terbuang sia-sia, baik dalam arti penghitungan kuantitatifnya maupun bobot nilai jenis pilihan yang ada oleh setiap orang lewat suaranya itu.

Hal lain yang sangat prinsipil dalam demokrasi adalah kebebasan dan kerahasiaan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Sifat dasar kontekstual ini kan berdampak pada terjadinya diferensiasi antara pemerintah dan komunitas

kemasyarakatan dengan melindungi partisipasi bebas setiap orang dalam badan itu masing-masing. Artinya, dengan sistem pemilihan yang bebas dan rahasia seseorang yang kebetulan secara profesional termasuk kalangan badan pemerintahan tidak dengan sendirinya harus (secara terpaksa) memberi suara untuk calon yang mewakili pemerintah, jika ia berpendapat tidak sepatutnya suara itu diberikan kepadanya, tetapi ia akan memberikanya kepada siapa saja menurut kecenderungan hati nuraninya. Maka, kebebasan dan kerahasiaan menghasilkan dimensi yang amat penting dalam pemberian suara, yaitu ketulusan yang sejati, yang pada urutannya akan mempunyai pengaruh positif pada penciptaan keabsahan pemerintah dengan kekuasaannya. Dan pemerintah dengan kekuasaannya. Dan pemerintah yang absah akan memberi landasan yang kukuh untuk terwujudnya rasa keadilan yang akan menjad dasar ketentraman dan kemantapan politik.

Sebaliknya, tanpa kebebasan dan kerahasiaan itu (misalnya akibat adanya trick-trick kalangan yang berkepentingan atas keadaan *status quo*), maka suatu pilihan tidak akan menghasilkan legitimasi politik, atau setidaknya akan menjadi sumber keraguan terhadap legitimasi kekuasaan pemerintah.⁵ Dan kekuasaan yang dipandang tidak absah oleh banyak warga negara akan mengakibatkan kekisruhan dan ketidakmantapan atau malah akan terjadi disintegrasi. Kebebasan dan kerahasiaan pemilihan umum juga mempunyai dampak lain yang sama pentingnya dengan yang diatas itu, jika tidak malah lebih penting. dengan kebebasan dan kerahasiaanitu dapatlah diperkecil atau dicegah samasekali terjadinya apa yang

⁵. Abdul Munir Mulkan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Cipress, Yogyakarta, 1994, hal.

disebut pemberian suara bulat oleh suatu kelompok, seperti, suara bulat oleh seluruh anggota kelompok yang terbentuk karena persamaan profesi, kedaerahan, keyakinan, agama, kepentingan, kerabat, kedudukan sosial, dan lain-lain.⁶ Sebab dengan kebebasan dan kerahasiaan itu seorang pemberi suara dapat menghindari tekanan, baik dari atasan maupun dari sesama rekan.

Dari segi lain, kebebasan dan kerahasiaan pemilihan umum akan memungkinkan pemberian suara oleh golongan kecil yang berbeda dengan golongan besar. Struktur ini mendorong terjadinya keluwesan masyarakat dan kemungkinan membatasi sekaligus menggerakkan pemerintah sebagai pelaku perubahan yang bertanggungjawab kepada masyarakatnya. Pemerintah dapat bergerak sebagai pelaku perubahan atas dasar legitimasi politik yang diperolehnya, dan terbatas oleh hal-hal yang tidak didukung oleh legitimasi politik itu.

A.3. BEBERAPA HAL TENTANG PARTAI POLITIK

Dalam kaitannya dengan masalah pemilihan umum itu, kita juga bersedia menilai kembali sistem kepartaian kita. Sebab, sementara demokrasi yang lebih maju tampaknya sungguh akan terwujud di negeri kita, tetapi ternyata masih timbul pertanyaan-pertanyaan yang masih perlu kejelasan, seperti bentuk pelebagaan apa yang diperlukan untuk menopang dan menjamin proses demokrasi itu secara konstruktif dan sehat? Kita harus mengakui mungkin harus disertai dengan cara bersyukur, bahwa *blessing* pada negeri kita selama orde baru

⁶. Emha Ainun Nadjib, *Markesot Bertutur*, Mizan, Bandung, 1993, hal. 22

ini ialah Golkar sebagai faktor pendukung utama terwujudnya pemerintah yang stabil dan kuat, yang memungkinkan pembangunan nasional yang kini kita rasakan bersama. Tetapi dengan mundurnya peranan angkatan 45 yang menjadi tulang punggungnya, maka tidak mustahil sedikit ataupun banyak, lambat atau cepat, Golkar akan terkena faksionalisme, sikap apatis para anggotanya, terutama ditingkatan akar rumput. Juga sama sekali tidak dapat dikesampingkan kemungkinan terjadinya antagonisme antara suatu kelompok elit pimpinan yang menghendaki pembaharuan dengan birokrasi yang konservatif. Maka, dalam skenario ini cukup masuk akal tampil suatu partai saingan, kalau tidak lewat PPP atau PDI yang ada sekarang tentu akan ewat jalur lain. Bahkan juga tidak mustahil suatu partai secara sendirian atau beberapa partai melalui koalisi akan mampu mengambil alih tanggung jawab pemerintahan di masa mendatang. Jadi Indonesia akan mempunyai sitem dua partai atau lebih di masa depan dengan kekuatan yang berimbang. Maka, keunggulan Golkar selama ini tidak menutup kemungkinan perintisan suatu sistem kepartaian yang lebih beragam dan kompetitif dan dalam sistem *check and balance*.⁷

Karena peranan besar Golkar selama ini, maka proses demokratisasi Indonesia banyak tergantung padanya. Demokratisasi intern Golkar sendiri sudah cukup lama menjadi kesadaran penuh para pimpinan dan tokohnya, seperti tercermin dalam suara-suara tentang perlunya membuat partai terbesar Indonesia itu lebih mandiri. Kesadaran ini adalah modal amat berharga, dan menjadi salah

⁷. Nurcholish madjid. *Dialog Keterbukaan*, Paramadina, Jakarta, 1998, hal. 45.

satu tumpuan terjadinya demokratisasi lebih lanjut di negeri kita. Dan wujud terpenting kemandirian Golkar adalah diferensiasinya yang tegas dari pemerintah. Kemandirian suatu partai yang menjadi *soko guru* bangunan demokrasi sama sekali tidak mengizinkan terjadinya identifikasi antara partai itu dengan negara atau pemerintah betapapun besar dan menentukannya pengaruh partai itu kepada negara dan jalannya pemerintahan.⁸ Pandangan ini bukanlah suatu jenis liberalisasi seperti banyak dikuatirkan kalangan tertentu, dan memang ada kaitannya dengan liberalisme berlebihan yang dahulu pernah membawa negeri kita ke ambang bencana. Demokratisasi tidaklah sama dengan liberalisasi. Sekalipun begitu, disebabkan oleh adanya prestise, popularitas, sumber daya yang besar, dan keahlian berorganisasi yang dimiliki Golkar, maka sangat sulit bagi PPP dan PDI yang kecil dan terpecah-pecah itu untuk berkembang menjadi saingan yang berarti di masa dekat ini. Oleh karena itu, tidaklah pada tempatnya bila Golkar pesimis, asalkan berani membuat langkah-langkah secara positif, menghadang perkembangan yang tidak bisa dielakan, dan Golkar harus mengembangkan dirinya menuju pertumbuhannya sebagai partai yang modern.

Kenyataan-kenyataan diatas itu perlu dipertimbangkan untuk kemungkinan diterapkan sistem pemilihan distrik seperti yang pernah menjadi bahan diskusi Seminar Angkatan Darat di Bandung pada awal Orde Baru.

⁸ A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, Lkis, Yogyakarta, 1995, hal. 67

Kemungkinan ini semakin dirasa sangat perlu, karena sebagai salah satu hasil positif pembangunan nasional selama dua dasawarsa ini adalah munculnya kelas menengah baru Indonesia. Segi-segi kekuatan mereka dalam bidang ekonomi, profesi, dan ilmu pengetahuan harus benar-benar diperhitungkan sebagai faktor pendukung ke arah demokrasi. Kelas menengah baru itu, terutama yang pribumi, tentu akan berkembang, dan momentum-momentum perkembangannya itu tidak mustahil menghasilkan dukungan pada aspirasi politik tertentu yang dibawa oleh kelompok tertentu.

Sementara itu, berkenaan dengan masalah-masalah kepartaian ini, sikap tanggap saja tidak cukup. Kita akan membuat kesalahan jika kita menyamakan sikap demokrasi dengan sikap tanggap. Banyak kalangan, termasuk pemerintah, yang karena kearifannya bersikap tanggap terhadap perkembangan, kemudian berbuat sesuatu yang bersifat positif sebagai hasil dan tujuan sikap tanggap itu. Tetapi, ketanggapan ini tidaklah sama dengan demokrasi. Sebab sudah ditegaskan bahwa demokrasi itu umumnya mengakui pada suatu proses dalam pencapaian suatu tujuan atau hasil, dan bukannya tujuan atau hasil itu sendiri, bagaimanapun positifnya. Karena itu, faktor partisipasi adalah sangat penting, sehingga terjadi perluasan *sense of belonging* yang mendasari rasa keadilan umum.

A.4. PRINSIP MUSYAWARAH DAN MASALAH OPOSISI

Pengujian rasional sebuah aturan itu dalam masyarakat demokratis dilahirkan dalam musyawarah dan pembahasan, yang hasil dan mutunya

tergantung kepada para peserta yang taat dan setia pada aturan musyawarah dan pembahasan. Dalam masyarakat yang diatur oleh prinsip-prinsip musyawarah, tidak ada "kebenaran mutlak" ataupun dalil-dalil mati yang menentukan tingkah laku manusia.⁹ Dalam musyawarah dan pembahasan itu, yang harus dicoba dengan tulus oleh setiap peserta adalah mendengarkan, memahami, dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian pada urutannya, memberikan pendapat dengan penuh ketulusan dan rasa hormat kepada para pendengar. Dan jika harus menentang suatu pendapat, maka kita tidak hanya harus menunjukkan sikap toleransi dengan penuh pengertian, tetapi juga menunjukkan sikap hormat dan respek kepada sesama. Ini tidak hanya sekedar masalah etiket dan sopan santun, lebih penting lagi, sikap saling menghormati dan penuh pengertian kepada sesama itu diperlukan untuk dapat menciptakan mekanisme berpikir dengan lebih baik. Dan dengan begitu musyawarah akan mencapai tujuan yang sebaik-baiknya.

Dalam kerangka itu, maka jelas suatu jenis kemitraan dalam musyawarah dan pembahasan diperlukan. Yaitu kemitraan dalam arti bahwa musyawarah harus dalam semangat dialog, tidak monolog. Dalam suatu sistem yang berkembang lebih kompleks, jelas bahwa tumbuhnya sistem yang mengenal oposisi merupakan suatu kewajaran. Dalam hal ini, sudah tentu yang dibenarkan adalah apa yang disebut "oposisi loyal", yaitu oposisi yang dilakukan demi tercapainya cita-cita bersama dan prinsip-prinsip bersama. Oposisi itu diperlukan karena ia memepertajam pikiran. Demokrasi menganut anggapan dasar bahwa musyawarah, tukar pikiran, diskusi, dan saling berbicara di antara orang-orang yang

⁹. Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997, hal. 180

berkebebasan dan berpengetahuan cukup serta tunduk pada etika musyawarah adalah jalan yang terbaik untuk mencapai keputusan dalam bidang apa pun. Sebab, hanya melalui musyawarah serupa itu maka kita kan terikat satu sama lain untuk mewujudkan tujuan bersama. Berkenaan dengan ini pimpinan dalam kedudukannya sebagai wasit atau penengah banyak dapat berbuat sangat konstruktif. Namun pimpinan sebagai wasit harus ingat bahwa ia berkewajiban melaksanakan aturan, tetapi tidak berhak menafsirkan aturan yang ada sekehendak hati, meskipun menurut pendapatnya baik. Lebih-lebih lagi tidak dibenarkan membuat aturan yang berbeda hanya karena aturan yang ada tidak berkenan padanya. Demokrasi juga menganut pandangan dasar bahwa jenis hubungan antara sesama warga masyarakat adalah persahabatan sebab persahabatan antara orang-orang dari kedudukan dan kemampuan yang beraneka ragam akan memperluas cakrawala pengertian kita dan dengan begitu memperkuat kemauan ikatan sosial kita. Demokrasi hidup dalam kesepakatan, dan ia akan tetap kuat bertahan selama tersedia banyak jalan untuk mencapai kesepakatan.

Partai oposisi adalah wujud modern dari ide demokrasi. Karena demokrasi yang sehat diperlukan *check and balance*, jadi ada kekuatan pemantau dan pengimbang. Sebab dari pandangan yang agak filosofis, manusia itu tidak mungkin selalu benar. Karena itu harus ada cara untuk saling mengingatkan apa yang tidak baik dan tidak benar. Dalam suatu masyarakat oposisi adalah suatu kenyataan, jika sekelompok itu tidak diakui yang terjadi adalah mekanisme saling curiga dan melihat oposisi sebagai ancaman. Oposisi disinilah bukan semata-mata menjatuhkan pemerintah. Ini berarti tidak sehat. Jadi sebetulnya orang beroposisi



kepada pemerintah, tetapi loyal kepada negara, loyal kepada cita-cita bersama. Bahkan kepada pemerintah pun, dalam hal-hal yang jelas baik, harus loyal. Dan oposisi loyal ini memang diciptakan untuk mengantisipasi munculnya oposisi yang sekedar oposisi. Oposisionalisme ini negatif.¹⁰

Oposisi itu berbeda dengan oposisionalisme. Oposisionalisme itu adalah menentang sekedar menentang, sangat subyektif, bahkan mungkin itikadnya urang baik, seperti misalnya kebiasaan mendaftarkan kesalahan orang semata. Yang dimaksud oposisi adalah di sini adalah oposisi dalam semangat yang loyal, dalam arti mengakui keabsahan suatu pemerintah untuk bertindak dan mengklaim sebagai pemerintah yang baik.

B. KEBEBASAN NURANI DAN KEMANUSIAN UNIVERSAL SEBAGAI PANGKAL DEMOKRASI

Manusia adalah jagad kecil suatu mikrokosmos yang menjadi cermin dari jagad besar, makrokosmos, yang meliputi seluruh alam semesta. Manusia adalah puncak ciptaan Tuhan, yang dikirim ke bumi untuk menjadi khalifah atau wakil Tuhan di bumi. Oleh karena itu setiap perbuatan yang membawa perbaikan manusia, oleh sesama manusia sendiri mempunyai nilai kebaikan dan keluhuran kosmis menjangkau batas-batas jagad raya, menyimpan makna kebenaran dan kebaikan universal, suatu nilai yang berdimensi kesemestaan seluruh alam. Dan karena manusia itu, dalam analisa terakhir, terdiri dari individu-individu atau kenyataan-kenyataan perorangan yang tidak terbagi-bagi, maka masing-masing

¹⁰. Nurcholish Madjid, *Op. Cit.*, 78

perorangan itu menjadi instansi pertanggungjawaban terakhir dan mutlak dalam pengadilan Hadirat Ilahi di akhirat nanti. Dan masing-masing perorangan itu pulalah yang akhirnya dituntut untuk menampilkan diri sebagai makhluk yang bermoral, yang bertanggungjawab, yang akan memikul segala amal perbuatannya tanpa kemungkinan mendelegasikannya kepada pribadi yang lain. Karena itu nilai seorang pribadi adalah sama dengan nilai kemanusiaan universal, sebagaimana nilai kemanusiaan universal adalah sama nilai dengan nilai kosmis seluruh alam semesta. Maka agama mengajarkan bahwa: "Barangsiapa membunuh seorang tanpa dosa pembunuhan atau tindakan kerusakan di bumi maka bagaikan ia membunuh seluruh umat manusia, dan barangsiapa menolong hidupnya maka bagaikan ia menolong hidup seluruh umat manusia".

Jadi harkat dan martabat setiap perorangan atau pribadi manusia dipandang dan dinilai sebagai cermin, wakil atau representasi harkat seluruh umat manusia.¹¹ Maka penghargaan dan penghormatan kepada harkat masing-masing manusia secara pribadi adalah suatu amal kebajikan yang memiliki nilai kemanusiaan universal. Dan demikian pula sebaliknya, pelanggaran dan penindasan kepada harkat dan martabat seorang pribadi adalah tindak kejahatan kepada kemanusiaan universal, suatu dosa kosmis, dosa yang amat besar. Harkat dan martabat pribadi itu sebagaimana, telah dikemukakan tadi dimulai, dengan pemenuhan keperluan hidup primernya, berupa sandang, pangan, dan papan. Tetapi dari deretan sejumlah argumen diatas juga dapat disimpulkan bahwa

¹¹. Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, Paramadina, Jakarta, Paramadina, 1997, hal. 37

terpenuhinya segi kehidupan lahir tidaklah akan dengan sendirinya mengantar manusia kepada dataran kehidupan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu kehidupan yang utuh, yang integral, yang memenuhi fungsi kekhalifahan kemanusiaan universal di bumi, berpangkal dari kebebasan dari setiap kebebasan nurani. Yaitu kebebasan dari setiap bentuk pemaksaan, sekalipun pemaksaan yang dilakukan atas kebenaran mapan, sesuatu yang jelas benar dan baik. Keutuhan hidup manusia dimulai dengan adanya kebebasan padanya untuk menerima atau menolak sesuatu yang berkaitan erat dengan nilai hidup pribadinya yang mendalam. Seorang manusia harus dibiarkan dengan bebas berekspresi dengan kebebasan hati nuraninya sendiri: kebebasan untuk menerima atau menolak sesuatu- baik dan buruk, benar dan salah dengan kesediaan menanggung resiko sendiri.¹²

Dalam persimpangan jalan pertumbuhan dan perkembangan bangsa kita yang amat penting sekatrang adalah, prinsip-prinsip kebebasan nurani dalam semangat kemanusiaan universal tersebut diatas sungguh harus dimulai menjadi acuan serius bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip-prinsip itu merupakan dasar atau titik tolak bagi segenap usaha mengembangkan dan menegakkan kesadaran demokrasi, sejalan tekad dan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam falsafah negara. Tak seorangpun dari kita yang boleh dibiarkan untuk menyisihkan hak istimewa untuk dirinya sehingga terbebas dari kewajiban

¹². Frans Magnis Suseno, *Demokrasi dan Tantangan Universal*, Jakarta, Paramadina, 1996, hal-121

memenuhi tuntutan nilai-nilai falsafah negara itu. Hak dan kewajiban setiap pribadi warga negara adalah sama di hadapan nilai kefasafahan negara.

Berdasarkan itu semua harus dipandang dan diterima sebagai hal yang wajar saja bahwa kalau sekarang gelombang tuntutan demokrasi dan demokratisasi mulai menguat di negeri ini. Wajar karena arus itu merupakan salah satu dari banyak konsekwensi alami tingkat perkembangan negara kita, baik yang materiil maupun yang non-materiil. Yang materiil ialah taraf hidup yang makin baik dari masyarakat pada umumnya, dan yang non-materiil ialah taraf kemampuan kognitif yang lebih tinggi daripada sebelumnya, sebagai hasil kesempatan berpendidikan yang bertambah luas. Sebagai hal yang wajar, kita harus menilai arah perkembangan itu secara positif jika dapat dilakukan pembedaan analitis yang tegas dan jelas antara segi makro dan segi mikro arah perkembangan itu, maka barangkali penilaian kita ialah bahwa keseluruhan perkembangan tersebut, maka barangkali penilaian kita ialah bahwa keseluruhan perkembangan tersebut, secara makro akan membawa kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, sekalipun segi-segi mikronya mungkin hal-hal yang tidak sepadan.

Dengan titik tolak pandangan dasar itu kita ingin bicara tentang demokrasi, oleh karena itu perkataan demokrasi sudah menjad kata-kata harian, ada kesan seolah-olah pembicaraan tentang hal tidak perlu lagi. Tetapi ketika orang menyadari adanya tarik-menarik antara, di satu pihak, pengertian demokrasi sebagai sesuatu yang universal dan, di pihak lain, perwujudan atau implementasi demokrasi itu dalam konteks ruang, seperti faktor geografis yang acapkali

berdampak kultural, dan konteks waktu seperti pengalaman sejarah suatu bangsa yang menjadi unsur kuat identifikasi diri bangsa itu, maka kita dapati bahwa demokrasi, seperti halnya dengan konsep-konsep besar lainnya, termasuk agama, tidak pernah sederhana. Diskusi, bahkan kontroversi, di negeri kita sekitar masalah itu sudah lama dikenal, sejak dari masa-masa para bapak republik meletakkan dasar pemikiran kenegaraan kita.

Kompleksitas demokrasi yang berada didalam dinamika tarik-menarik antara universalitasnya dan kenisbian kultural dalam perwujudannya tercermin dalam kenyataan tentang banyaknya ragam atau versi demokrasi, dari satu negara ke negara lain. Keragaman itu sedemikian rupa sehingga penilaian terhadap versi yang berbeda-beda itu mendorong penilaian yang berbeda-beda pula, dalam kategori penolakan dan penerimaan, pendukung dan penentangan. Alexis de Toqueville, misalnya dalam bukunya yang sudah menjadi. Klasik, *Democracy in America*, mendapati bahwa demokrasi ala Amerika adalah pada hakikatnya sebuah sistem yang memberi peluang kepada mayoritas untuk bertindak semauanya.¹³

Demokrasi dalam pengertian yang lebih menyeluruh tidak dapat direduksikan hanya kepada mekanisme-mekanisme pelaksanaan kekuasaan yang antara lain melahirkan kekuasaan mayoritas yang mungkin saja berlangsung atas kerugian minoritas. Demokrasi adalah lebih banyak daripada sekedar tatanan pemerintahan.¹⁴ Meskipun hal itu amat penting, namun ia harus dipandang

¹³. Adnan Buyung Nasution, *HAM dalam Masyarakat Islam dan Barat*, dalam. Nasir Tamara, (ed.), 1996, hal. 105

¹⁴. Guillermo O'Donnell, *Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta, LP3ES, 1993, hal. 92

sebagai salah satu hasil akhir yang bersifat formal dan struktural. Dan segi-segi kekurangan sudut formal dan struktural demokrasi itu dapat diimbangi dengan usaha perbaikan sambil berjalan, melalui improvisasi berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata. Justru kekuatan demokrasi ialah bahwa ia merupakan sebuah sistem yang mampu, melalui dinamika internnya sendiri. Untuk mengadakan kritik ke dalam dan perbaikan-perbaikannya, berdasarkan prinsip keterbukaan dan kesempatan bereksperimen itulah salah satu dari ruh demokrasi yang paling sentral.

Keterbukaan itu dengan sendirinya mengandung pengertian kebebasan. Dan logika dari kebebasan ialah tanggung jawab. Seseorang disebut bebas apabila ia dapat melakukan sesuatu seperti dikhendakinya sendiri atas pilihan serta pertimbangannya sendiri, sehingga orang itu secara logis dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan. Seseorang yang melakukan sesuatu karena terpaksa dengan sendirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya.

Demokrasi adalah suatu kategori dinamis, bukan statis. tidak seperti kategori-kategori statis yang stasioner, suatu kategori dinamis selalu dalam keadaan terus bergerak, baik secara negatif atau positif. Dalam masalah sosial, suatu nilai yang berkategori dinamis seperti demokrasi dan keadilan, gerak itu juga mengimplikasikan perubahan dan perkembangan. Karena adanya gerak itu maka, demokrasi dan keadilan tidak dapat didefinisikan "sekali untuk selamanya". Karena itu "demokrasi" adalah sama dengan proses demokratisasi terus menerus. Cukuplah untuk dikatakan bahwa suatu masyarakat tidak lagi demokratis kalau ia berhenti berproses menuju kepada yang lebih baik, dan terus yang lebih baik lagi. Oleh karena itu faktor eksperimentasi, dengan coba dan salahnya, adalah bagian yang integral dari ide tentang demokrasi. Suatu sistem disebut demokratis jika ia membuka kemungkinan eksperimentasi terus menerus, dalam kerangka dinamika pengawasan dan pengimbangan (check and balance) masyarakat. Demokrasi yang dirumuskan "sekali untuk selamanya", sehingga tidak memberi ruang bagi adanya perkembangan dan perubahan, adalah sesungguhnya bukan demokrasi, melainkan kediktatoran. contoh yang paling mudah untuk hal ini ialah apa yang disebut "Demokrasi Rakyat" model negara-negara komunis.¹⁵ Itulah demokrasi yang dirumuskan "sekali untuk selamanya". Dan pengalaman menunjukkan bahwa begitu orang mencoba merumuskan demokrasi "sekali untuk selamanya" maka ia berubah menjadi ideologi tertutup, padahal mengatakan demokrasi sebagai ideologi tertutup adalah kontradiksi dalam terminologi.

¹⁵ . Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*, Sippres, Yogyakarta, 1994, hal. 28

Itu sebabnya maka demokrasi memerlukan ideologi yang terbuka. Atau, demokrasi adalah ideologi terbuka. Yaitu, sekali lagi, sebuah ideologi yang membuka lebar pintu bagi adanya perubahan dan perkembangan, melalui eksperimentasi bersama. Karena itu demokrasi adalah satu-satunya sistem yang mampu mengoreksi dirinya sendiri dan membuat perbaikan dan perubahan ke arah kemajuan bagi dirinya sendiri. Eksperimentasi itu sebagaimana telah disinggung, dipertaruhkan kepada dinamika masyarakat, dalam wujudnya sebagai dinamika pengawasan dan pengimbangan (check dan balance). Mengapa pengawasan, karena sebagai ideologi terbuka, demokrasi adalah sistem yang terbuka untuk semua pemeran serta (partisipan), dan tidak dibenarkan untuk diserahkan kepada keinginan pribadi dan kebijaksanaannya betapapun bijaksannya orang itu. Dan mengapa pengimbangan, karena sistem masyarakat dapat dikatakan demokratis hanya jika terbuka kesempatan bagi setiap kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi, apa pun dan bagaimanapun caranya, dan tidak boleh dibiarkan adanya unsur sebagian yang mendominasi keseluruhan.¹⁶ Dengan begitu terciptalah sistem yang dalam dirinya terkandung mekanisme untuk mampu mengoreksi dan meluruskan dirinya sendiri, serta mendorong pertumbuhan dan perkembangannya ke arah yang lebih baik. Karena dalam analisa terakhir masyarakat terdiri dari pribadi-pribadi atau, dalam perkataan lain, masyarakat adalah jumlah keseluruhan pribadi-pribadi, maka demokrasi pun sesungguhnya berpangkal kepada pribadi-pribadi yang "berkemauan baik". Akan tetapi karena

¹⁶ . Mohtar Mas'ood, *Islamisasi Negara dan Islamisasi Masyarakat*, dalam. Arif Afandi, (ed.), 1996, hal. 74

sifatnya yang pribadi itu, kemauan atau itikad, baik dan buruk, dapat dipandang sebagai "rahasia" yang menjadi urusan pribadi yang bersangkutan. Maka ia akan mempunyai fungsi sosial hanya jika diwujudkan dalam tindakan bermasyarakat, yang berdimensi sosial.

arena tindakan berdimensi sosial itu menyangkut para anggota masyarakat yang menjadi lingkungannya, jauh atau dekat maka ia tidak dapat dipertaruhkan hanya kepada keinginan atau aspirasi pribadi. Tidak boleh diremehkan adanya kemungkinan seorang pribadi dikuasai oleh kepentingan dirinya sendiri dan didikte oleh *vested interest*-nya menuju ke arah tirani. Maka dari itu dalam masyarakat selalu diperlukan adanya mekanisme yang efektif untuk terjadinya proses saling mengingatkan tentang apa yang benar dan yang menjadi kebaikan bersama. Dan pada urutannya, proses serupa itu memerlukan kebebasan menyalakan pendapat, berkumpul dan berserikat.¹⁷

Oleh Karena itu setiap pengekangan kebebasan-kebebasan tersebut dan pencekalan atau pelarangan berbicara dan mengemukakan pikiran adalah pelanggaran yang amat prinsipil terhadap tuntutan falsafah kenegaraan kita

C. PROFESIONALISASI POLITIK UNTUK PEMBANGUNAN DEMOKRASI

Akhir-Akhir ini banyak orang melontarkan gagasan tentang kemungkinan diterapkannya pikiran tentang "profesionalisasi politik" atau "politik profesional".

¹⁷. Riswandha Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal. 91

Lepas dari pengertian yang kurang jelas atau berbeda-beda sekitar istilah-istilah itu, namun gejala pelontarannya itu sendiri harus dipandang sebagai indikasi kepada suatu perkembangan sosial politik kita yang positif.

Perkembangan positif itu ialah adanya keberanian yang semakin meningkat untuk menyatakan suatu keinginan di bidang politik. Pelontaran sekitar gagasan "profesionalisme politik" tentu mengimplikasikan penilaian bahwa sistem perpolitikan kita masih belum profesional, alais amatir atau malah barangkali "amatiran". Oleh karena itu, di balik pelontaran ide tentang "profesionalisme politik" terselip keinginan agar mutu perpolitikan kita melalui para aktor politiknya, hendaknya ditingkatkan. Dan adanya keinginan itu sendiri dapat dipandang sebagai gejala adanya tuntutan politik yang meningkat, yang tentunya juga berarti meningkatnya kesadaran rasa ikut memiliki dengan wujud peran serta di bidang politik. Oleh karena itu, sikap yang pertama-tama harus ditegakkan menghadapi berbagai pelontaran tuntutan itu ialah dengan memahami dan menerimanya secara positif.¹⁸

Sesungguhnya, artikulasi politik tidaklah hanya menjadi tugas kaum politisi saja. Di setiap masyarakat, hanya sebagian kecil saja komunikasi politik berasal dari para politisi. Bahkan ada indikasi yang kuat bahwa semakin maju masyarakat, semakin banyak tumbuh partisipasi politik tanpa kekuasaan atau peran politik formal. Mereka ini dapat tumbuh menjadi kelompok komunikator profesional. Justru setiap pembangunan atau modernisasi dalam pengertian mendasarnya akan melahirkan kelompok komunikatif yang profesional.

¹⁸. Arief Budiman, *Op cit.* hal. 76

(Nurcholish Madjid, 1997:232). Tetapi jika proporsi artikulasi politik oleh kaum politisi dan bukan politisi tergantung pada tingkat kemajuna masyarakat, makin maju makin banyak peranan non-politisi formal, maka sesuai dengan tingkat perkembangannya, negara kita masih dalam tahap pertumbuhan yang meminta peranan lebih besar dari para politisi.

Kajian-kajian tentang demokrasi juga menunjukkan bahwa pada masa-masa tertentu, khususnya sebelum PD I, kata-kata itu digunakan dalam makna yang tidak positif, malah mengandung pengertian yang bersifat mengejek atau menyindir. Hitler bahkan tercatat pernah berusaha menggunakan kata "demokrasi" ini dengan nada menghina. Tetapi cukup ironis baginya bahwa perang yang diletuskannya dimenangkan oleh musuh-musuhnya justru yang mengaku sebagai pendukung "demokrasi".

Tinjauan itu menunjukkan bahwa masalah demokrasi secara konsepsional, tidaklah sederhana. Kini demokrasi secara erat dikaitkan oleh Barat. Namun, Barat sendiri menganut berbagai versi demokrasi, sesuai dengan kultur politik negara atau bangsa yang bersangkutan. Dalam sejarah Amerika Serikat, perkataan demokrasi pada awalnya tidaklah begitu banyak digunakan. Mereka menggunakan perkataan republik dengan pengertian seperti [engertian perkataan demokrasi sekarang ini. Berdasarkan itu, maka dapat dibenarkan bahwa bangsa Indonesia berpandangan tentang adanya bentuk demokrasi tertentu yang cocok untuk Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila. Ini dapat dilihat sebagai penegasan bahwa Demokrasi Pancasila adalah pandangan politik bangsa Indonesia yang meskipun modern atau sejalan dengan perkembangan zaman (adaptif) namun berakar dalam

"budaya politik" Indonesia. Dan berdasarkan kejelasan itu harus diikuti dengan kreatifitas yang dinamis dalam menumbuhkan konsep-konsep "Demokrasi Pancasila" yang relevan dengan tahap perkembangan akhir bangsa dan negara kita.

Maka dari itu, yang pertama-tama diperlukan dalam usaha profesionalisasi politik kita adalah pemerataan pengertian yang mendalam tentang budaya politik kita yang kompleks itu oleh para pelaku politik yang mempunyai pandangan jauh ke depan. Para pelaku politik itu tidak bisa tidak harus terdiri dari orang-orang yang kepentingannya tidak terbatas hanya kepada pemenuhan berbagai keinginan yang bersifat pribadi, tetapi ia sanggup melambungkan pandangan dan wawasannya dalam mengatasi hal-hal yang sifatnya sementara.

Dahulu di negeri kita ini pernah muncul adupendapat tentang pilihan antara partai kader dan partai massa. Herbert Feith, seorang pengamat Indonesia dari Australia, mengaitkan ide tentang partai kader dengan mereka yang berorientasi politik "*problem solving*" dan partai massa dengan mereka yang berpandangan "*solidarity making*". Sekaligus di situ ada perbedaan aktivitas intelektual dan peranan aktifitas sentimental atau emosional. Juga terdapat *kecejajaran (egalitarianisme)* itu semua dengan para demagog dan kader.¹⁹

Oleh karena itu, langkah pertama untuk menuju profesionalisasi politik ialah pemantapan pendidikan politik yang penuh tanggung jawab, tidak bersifat demagog dan propaganda semata-mata. Rakyat harus dididik dan disadarkan tentang berbagai kenyataan negara, yang manis maupun yang pahit, sehingga

¹⁹. Bahtiar Effendi, *Islam dan Demokrasi*, dalam. Nasir Tamara, (ed.), 1996, hal. 86

dalam mengajukan tuntutan atau harapan mereka akan berpijak pada kenyataan-kenyataan itu.²⁰ Dalam implikasinya yang lebih luas, seperti dikatakan Shils dalam awal kutipan di atas, pemantapan pendidikan politik ini berarti akan menciptakan masyarakat yang terbuka dan bebas, khususnya yang menyangkut informasi dan komunikasi. Ketertutupan di bidang informasi dan komunikasi politik akan banyak menjadi lahan subur bagi berkembangnya budaya fitnah, desas-desus dan umpat-mengumpat (sebagai bentuk-bentuk komunikasi tertutup), dan itu semua pada urutannya akan menjadi lahan yang baik bagi demagogi dan agitasi politik oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

Justru keterbukaan itu merupakan bagian integral dari demokarsi itu sendiri, termasuk demokarsi Pancasila. Keterbukaan itu terlebih dahulu dan terutama dituntut dari para pelaku politik sendiri. Sebab, tingkah laku mereka adalah salah satu sumber peneladanan, dan peneladanan oleh orang banyak akan tumbuh menjadi kultur politik umum. Maka, jika dikehendaki pertumbuhan demokrasi, pola-pola hubungan antar-para pelaku politik itu sendiri haruslah demokratis, yaitu dengan menghindari peragaan konflik-konflik terbuka. Sistem pergaulan demokratis sampai batas yang cukup jauh menghendaki sikap saling percaya dalam semangat persamaan.

Yang tidak kurang penting dalam profesionalisasi politik ini adalah [enyadaran umum bahwa demokrasi mengimplkasikan kebebasan, dan kebebasan itu menuntut tingkat keberanian yang lebih tinggi untuk memikul tanggung jawab pribadi. Penyadaran ini penting, begitu pula latihan dan pendidikan untuk

²⁰ . Michael Rush, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 234

memikul tanggung jawab pribadi adalah vital dalam rangka pembangunan demokrasi, sebab tidak semua orang meneriakkan slogan-slogan kebebasan dan tanggung jawab mngerti makna kebebasan dan implikasinya. Justru menurut Eric Fromm, banyak orang sebenarnya takut pada kebebasan, karena takut atau tidak sanggup memikul beban tanggung jawab pribadi yang menjadi implikasinya. Ketakutan inilah yang bisa menjelma dan tumbuh menjadi psikologi massa yang menghalangi pertumbuhan demokrasi, karena keadaan itu berarti akan mempersiapkan dan mengkondisikan masa untuk menjadi mangsa para demagog. Dengan segala kelemahannya, organisasi politik masih merupakan sarana yang terbaik untuk memantapkan pemerintahan nasional yang sah. maka harus digunakan bagi proses demokratisasi.

D. IMPLEMENTASI PANCASILA DAN DEMOKRASI UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL.

Pancasila dengan semua silanya yang lima itu adalah suatu kesatuan yang utuh, yang tidak boleh dan tidak dapat dipisahkan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, pelaksanaan Pancasila pun haruslah utuh, tanpa ada tekanan pada salah satu silanya secara tidak beralasan. Sementara itu, untu kepraktisan pendekatan, kita dapat mencoba memahami lebih jauh masing-masing sila itu, kemudian melihat kemungkinan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelaksanaan nilai-nilai yang berdasarkan kepadanya. Dan perlu kita sadari pula bahwa antara sila-sila dalam Pancasila tersebut ada kaitan yang sangat erat yang menjadi

perekat bagi keutuhan nilai ideologisnya. Dari adanya keterkaitan ini kita bisa mencoba memahami makna yang terkandung dalam sila-sila ini secara lebih utuh.

Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini dapat disebut sebagai sila dasar untuk sila-sila yang lain. Sebab, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberi kita dasar bagi kehidupan berkeimanan dan berketakwan ini, merupakan sumber dari tiga hal yang sangat hakiki dalam kehidupan kita.²¹

Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar utama dan hakiki bagi adanya kesadaran tentang makna dan tujuan hidup. Semua orang bahkan juga kaum komunis yang tidak percaya pada adanya Tuhan, sedikit banyak memiliki tujuan hidup dan menginginkan hidupnya itu bermakna. Tetapi runtuhnya komunisme ini menjadi bukti "mutakhir", bahwa suatu makna dan tujuan hidup tidak hanya cukup hanya bersifat duniawi (terrestrial), melainkan harus bersifat ukhrawi (percaya pada kehidupan sesudah mati, akhirat). Jatuhnya komunisme ini juga menjadi peringatan bagi kita bahwa kita harus mampu mengatasi nilai-nilai duniawi ini dengan berorientasi pada yang bersifat Maha Tinggi atau transendental, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Adanya kesadaran tentang makna dan tujuan hidup merupakan pangkal pertama dan utama bagi ketahanan mental. Manusia akan lebih bersedia menderita dalam memperjuangkan sesuatu yang baginya bermakna dan bertujuan (sehingga akan muncul semangat berkorban) daripada menempuh hidup yang tidak berarti, tidak penting, yang kadang-kadang dirinya pun dianggap tidak penting.

²¹ . Arbit Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 61

Kedua, jika tidak didahului dengan pelepasan diri dari semua bentuk kepercayaan palsu, sikap percaya pada Tuhan Yang Maha Esa itu tidaklah absah dan juga tidak akan berdampak positif dalam hidup terestrial dan trasendental. Ini merupakan persoalan yang untuk sebagian besar manusia sangat sulit dan sering dilematis. Manusia hidup tidak mungkin tanpa kepercayaan, apapun bentuk kepercayaan itu. Ini dikarenakan kepercayaan itu akan memberikan penjelasan tentang hidup ini, asal muasalnya, dan lingkungannya. Dari penjelasan ini dapat kita pahami mengapa setiap komunitas manusia memiliki legenda-legenda dan mitos-mitos.²² Namun, sebagai konsekwensinya, orang yang berkepercayaan itu dengan sendirinya akan tunduk dan akan menjadi "abdi" dari kepercayaannya tersebut. Dengan demikian kita terancam kehilangan kebebasan hakikinya, dan juga kehilangan harkat dan martabatnya yang tinggi sebagai manusia. Karena praktis setiap orang mempunyai kepercayaan, dan dalam kepercayaan itu, akibat lingkungan budayanya, tidak mustahil mengandung unsur-unsur palsu, maka secara metodologis dia harus mampu membebaskan diri dengan membuang setiap bentuk unsur kepercayaan palsu itu, dengan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa saja. Memang kita akui bahwa proses pembebasan ini sulit, namun jika yang bersangkutan berhasil maka kebaikan yang akan diterimanya sebagai *reward* sungguh besar, yaitu diperolehnya harkat martabatnya yang tinggi sebagai manusia yang terhormat. Manusia sebagai puncak ciptaan Tuhan adalah lebih mulia daripada alam sekitarnya. Oleh karena itu, dia harus melepaskan diri dari kungkungan dan perbudakan obyek kepercayaan palsu tersebut. Sebab,

²². Beling, *Modernisasi Masalah Model Pembangunan*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 206

kepercayaan palsu itu pada hakikatnya adalah kepercayaan dan pemujaan yang tidak pada tempatnya, baik itu dalam bentuk pemujaan pada sesama manusia, makhluk lain, ataupun pemujaan pada alam sekitarnya.

Ketiga, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar utama dan hakiki sebagai kesadaran etis dan moral manusia. Dia memberi kita keteguhan wawasan tentang benar dan salah, serta tentang yang baik dan buruk. Mereka yang memiliki kesadaran tentang makna dan tujuan hidup yang teretrial sekaligus transedental tentu juga menyadari tentang adanya dimensi kehidupan yang lebih penting, lebih hakiki, dan lebih menjamin kebahagiaan total daripada wujud keseharian hidup duniawi ini. Keinsafan seseorang akan adanya Tuhan, yang senantiasa hadir dalam hidup dan menyertai serta mengawasi setiap pribadi manusia dalam segala kegiatannya, tentu akan menjauhkan orang tersebut dari kemungkinan melakukan sesuatu yang sekiranya tidak mendapat "perkenan" dari Tuhan-Nya. Oleh karena itu, seseorang yang berketuhanan Yang Maha Esa akan senantiasa melakukan seluruh pekerjaannya dengan utuh tanggung jawab secara etis dan moral. Tanggung jawab ini diwujudkan dengan senantiasa melakukan konsultasi pada suara hatinya yang paling dalam dan paling suci.²³ Yaitu hati nurani yang artinya cahaya dalam bahasa Inggris *luminous* karena merupakan "modal primordial" bagi manusia untuk menerangi jalan hidupnya dengan adanya keinsafan naluri tentang baik dan buruk, benar dan salah. Dengan jiwa dan makna Ketuhanan Yang Maha Esa seseorang terbimbing ke arah pengenalan dirinya sendiri yang paling mendalam dan paling suci, yaitu hati nuraninya. Dan dengan pengenalan

²³. Arbi Sanit, Op cit, hal. 87

diri sendiri yang mendalam dan suci itu dia akan terbimbing ke arah budi pekerti luhur.

(2). Sila Perikemanusiaan Yang Adil dan beradab harus dipandang sebagai kelanjutan langsung serta rangkaian kesatuan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dimensi kepercayaan yang bersifat, perorangan, pribadi, dan tersimpan rapat dalam diri sendiri, sehingga tidak mungkin dicampuri, diketahui, atau diintervensi oleh orang lain. Dimensi keimanan dan taqwa adalah rahasia masing-masing pribadi manusia yang tidak dapat diuji, diawasi, ataupun sekedar diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, Ketuhanan Yang Maha Esa itu *ansich* yakni, dalam artian yang abstrak murni tidak cukup sebagai landasan hidup individual dan sosial yang bahagia. Ketuhanan Yang Mha Esa memerlukan penjabaran dan peneguhan suatu nilai yang secara potensial bersifat inherent padanya. Penjabaran dan peneguhan nilai itu terwujud dalam bentuk menguatnya keinsafan moral dan keinsafan etis atau wawasan budi pekerti luhur. Dan budi pekerti itu adalah pola yang mendapat perkenan Tuhan Yang Maha Esa dari tata cara pergaulan manusia dengan sesamanya. Oleh karena itu, landasan pertama dan utama kebahagiaan hidup manusia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan diikuti dengan budi pekerti luhur yang merupakan wujud wawasan dari perikemanusiaan.

Selanjutnya, dalam rangka memahami sila Perikemanusiaan itu yang penting sekali disadari adalah kemestian adanya pra-anggapan dasar bahwa manusia merupakan makhluk kebaikan, yang senantiasa merindukan dan berusaha menemukan kebenaran dan kebaikan. Sebab sejalan dengan hati nuraninya, yang

merupakan *locus* dari hakikat kesucian asalnya yang hakiki itu, kebenaran dan kebaikan adalah bagian hakiki dari keinsafan akan makna dan tujuan hidup yang akan memberinya kebahagiaan. Singkatnya, manusia akan bahagia karena adanya kebaikan dan kebenaran pada dirinya. Dan sebaliknya, dia akan sengsara dengan kejahatan dan kepalsuan. Karena hakikat kemanusiaan yang sangat mendasar itu maka dengan sendirinya setiap orang harus menghormati dan memuliakannya sesamanya dengan memberlakukannya dengan baik dan benar, atau dengan adil dan beradab, karena tidak jarang usaha menegakkan kebenaran harus dengan pertimbangan nyata yang ada dalam kehidupan sosial. Sehingga tidak menjadi mandul dan kehilangan segi kemaslahatan umum yang diakui secara meluas dalam masyarakat.²⁴

(3). Sila Persatuan Indonesia, Persatuan adalah nilai piranti yang sangat esensial dan strategis. Persatuan memberi wadah bagi setiap usaha melaksanakan nilai-nilai luhur kehidupan manusia. Tanpa persatuan, nilai-nilai luhur dan menjadi *conditio sine quanon* bagi pelaksanaannya, maka kedudukannya menjadi sama pentingnya dengan nilai-nilai luhur itu sendiri.²⁵ Dari sinilah kita harus memandang dan memahami makna sila persatuan Indonesia.

Sementara, itu nilai Persatuan Indonesia itu harus kita persepsikan dalam rangkaian kesatuan dengan motto nasional, Bhineka Tunggal Ika. Motto itu mengandung pengakuan dasar bahwa bangsa Indonesia merupakan masyarakat bhinneka atau amjemuk (plural). Dan atas dasar kebhinekaan itu ditegaskan

²⁴ . Nurcholish Madjid, Op cit, hal. 215

²⁵ . Ibid, hal. 216

persatuan yang dinamis. Persatuan yang dinamis adalah persatuan dalam kemajemukan, dengan makna tersirat yang mengakui adanya hak untuk berbeda dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Persatuan Indonesia adalah persatuan yang memberi ruang pada kreativitas atau daya cipta berdasarkan kebebasan yang bertanggungjawab yaitu kebebasan dalam bingkai persatuan, dan menghasilkan persatuan atas dasar dinamika kebebasan yang absah. Disebut kebebasan yang bertanggung jawab atau absah, karena dinamika masyarakat tidak boleh menjerumuskan bangsa pada situasi kacau (chaos), yang justru akan meniadakan ruang bagi pelaksanaan kebebasan itu sendiri. Kebebasan tidak mungkin terwujud dalam masyarakat yang kacau. Karena kekacauan itu sendiri secara logis-politis akan memberi peluang tampilnya orang kuat atau diktator yang akan merampas kebebasan dengan dalih mereka akan mengatasi kekacauan tersebut.²⁶ (4). Sila Kerakyatan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini sering dipahami sebagai sila demokrasi. Sila kerakyatan ini juga tidak mungkin dipisahkan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, dan Sila Persatuan Indonesia yang dinamis. Jika kepercayaan kita pada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana telah dijabarkan diatas, benar-benar menghasilkan budi pekerti luhur, yang diterjemahkan ke dalam nilai Perikemanusiaan yang adil dan beradab dengan pola sosial yang saling menghormati dan menghargai, maka salah satu muara nilai dan sikap itu adalah kesediaan untuk mengakui kekuasaan rakyat dalam kehidupan bernegara dan

²⁶. Alan Ryan, Hobbes, *Toleransi, dan Kehidupan Batin*, dalam. David Miler, 1986, hal. 320

berpemerintahan. Pengakuan pada kekuasaan rakyat itu dimulai dengan pengakuan adanya hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat. Setelah adanya pengakuan hak warga negara itu, sebagai imbalannya yang logis, dilanjutkan dengan pengakuan pada adanya kewajiban setia orang untuk mendengar dan memperhatikan pendapat orang lain. Hak setiap orang untuk menyatakan pendapat adalah karena adanya nilai kemanusiaan universal yang beraggapan dasar bahwa manusia adalah makhluk kebenaran dan kebaikan. Sedangkan kewajiban setia orang untuk menyatakan mendengar dan memperhatikan pendapat orang lain. ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia itu adakalanya berpandangan dan berbuat salah karena alpa atau keliru. Dinamika tarik menarik antara hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan ini melahirkan mekanisme musyawarah yang berarti saling memberi isyarat, yaitu isyarat tentang yang baik dan benar.

Namun, dari sini timbul persoalan, karena tidak selamanya kelompok besar menyuarakan yang baik dan benar. Selalu ada kemungkinan kelompok besar justru hanyut dalam kealpaan dan kekeliruan misalnya, karena pengaruh budaya lingkungan yang tidak benar. Sebaliknya, tetap ada kemungkinan bahwa justru kelompok kecil membawa kebenaran dan kebaikan, karena kebetulan memiliki akses tertentu sehingga lebih memahami kebaikan dan kebenaran itu daripada kelompok besar. Hal yang sangat logis ini yaitu kemungkinan kelompok besar dalam kekeliruan dan kelompok kecil dalam kebenaran mengharuskan kita untuk melacak secara sungguh-sungguh dan mengharuskan bersama menggali apa yang sesungguhnya benar dan merupakan hikmah yang berarti wisdom atau sophia,

yaitu kearifan dari semua pikiran yang sudah ada. Maka, adanya sikap apriori yang selalu membenarkan kelompok besar dan menyalahkan kelompok kecil tidak bisa dibenarkan. Prinsip ini membawa kita ada prinsip selanjutnya, yaitu mufakat yang berarti persetujuan atau kesepakatan bersama.²⁷

Lebih lanjut, demi kepraktisan, suara rakyat banyak itu harus disalurkan melalui berbagai kelembagaan politik yang disepakati bersama secara absah dan adil. Lembaga politik ini anatara lain dalam bentuk badan-badan perwakilan, seperti DPR dan MPR yang ditetapkan menurut UUD 45. Hak setiap orang untuk menyatakan pendirian dan pendapat memang merupakan prinsip dasar yang pertama, namun dalam situasi apa pun dan di manapun pendirian dan pendapat rakyat itu harus dikanalisasikan secara formal. Kanalisasi ini justru untuk memperoleh efektivitas pelaksanaannya pada dataran kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

(5) Sila kelima, yaitu Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini dipandang sebagai tujuan kehidupan kita bernegara dan bermasyarakat yang beriman dan bertaqwa (sila pertama), mengikuti prinsip-prinsip kemanusiaan (sila kedua), bersatu secara nasional (sila ketiga), dan mengakui kedaulatan atau kekuasaan rakyat dengan menerapkan mekanisme musyawarah atau mufakat (sila keempat). Keadilan di sini bukan berarti bahwa tiap orang harus memperoleh dan memiliki kekayaan yang sama, seperti semboyan yang pernah dipopulerkan oleh orang-orang PKI "*sama rata sama rasa*". Namun, keadilan yang dimaksud adalah adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan yang sesuai dengan kondisi

²⁷. Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam*, Mizan, Bandung, 1997, hal. 182